



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, hanya berkat karunia-Nya Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Untuk melanjutkan serta meningkatkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk Tahun 2026.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini dapat berjalan sesuai rencana, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Rencana Kerja (RENJA) ini dalam pengerjaan cukup banyak keterbatasan yang dialami, untuk itu kami mohon berbagai masukan dan saran guna melengkapi dokumen ini untuk dapat mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai daya saing komparatif dan kompetitif.

Jambi, September 2025

Kepala Dinas,



ASRAF, S.Pt. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661120 199403 1 006

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	30
2.4. Reviu Terhadap RKPD Tahun 2026	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	58
III. TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3. Program dan Kegiatan.....	61
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	96
V PENUTUP.....	109
LAMPIRAN.....	111

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- 1) RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah dan program/Kegiatan Perangkat Daerah;
- 2) RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2026.
- 3) RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026

dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumberdaya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan *blue economy* tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan *blue economy* perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Terwujudnya *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu *partisipasi, transparansi dan akuntabilitas*.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Penyesuaian dokumen Rancangan Akhir Rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Jambi dan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus “DIMANTAPKAN” secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan dan perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat Jambi, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang –undangan, antara lain:

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang;
12. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jmabi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :

- 1) Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan pagu dana indikatif beserta sumbernya yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
- 2) Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati. Seluruh upaya dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026 | BAB I - V koordinasi dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 3) Untuk menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam pelaksanaan program kegiatan lebih efektif dan efisien;
- 4) Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan dengan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- 5) Sebagai media pengukur kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
- 6) Sebagai bahan dalam evaluasi untuk penetapan strategi pelaksanaan program kegiatan di waktu atau tahun yang akan datang.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Penyajian Renja OPD dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. **Latar Belakang.**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. **Landasan Hukum.**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. **Maksud dan Tujuan.**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. **Sistematika Penulisan.**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

2. **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-1) 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n1) 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. **Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2025).**

Memuat prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun berjalan (Tahun 2025) menyesuaikan dengan target yang telah ditetapkan.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja OPD,
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*),
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja OPD,
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.5. Review terhadap Rancangan RKPD.

Memuat Rancangan RKPD sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat Usulan program dan kegiatan masyarakat yang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

3. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan,
- d. pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5. BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD

Selama Pelaksanaan Renja tahun 2025 kegiatan-kegiatan pada program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi secara umum tidak mengalami kendala, akan tetapi ada beberapa program/kegiatan yang harus ditambah penganggarannya dan perubahan kode rekening belanja, hal tersebut sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta untuk memenuhi Visi dan Misi Gubernur Terpilih, yaitu untuk menuju Jambi “MANTAP”.

Gambaran Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 202 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan s/d Triwulan II Tahun 2025 Provinsi Jambi

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			
												I		II		III		IV									
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Indeks	89,2	39.000.000.000			86	22.204.211.478		4.571.736.785		6.611.397.344							11.183.134.129		50,36	0	11.183.134.129	
				Nilai AKIP Perangkat daerah (Nilai)	Nilai	82				77															0		
				Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)	Nilai	75				70,01															0		
		3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan	%	90	1.830.000.000	90		90	319.171.710	90	60.899.800	90	89.160.200			90	150.060.000	100	47,02	90	150.060.000				
				Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	%	90		90		90		90		90			90		100		90			90			
				Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	%	95		95		95		95		95			95		100		95				95		
		3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	480.000.000			3	99.073.100		13.206.200		38.441.700			0	51.647.900		52,13	0	51.647.900				
		3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	350.000.000			2	0						0				0		0				
		3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	450.000.000			10	62.391.460		12.272.000		11.805.000			0	24.077.000		38,59	0	24.077.000				
		3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	550.000.000			1	157.707.150		35.421.600		38.913.500			74.335.100		47,13	0	74.335.100					
		3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang Difasilitasi	%	100	30.665.500.000	100		100	20.854.540.174	100	4.254.185.035	100	6.187.000.834			100	10.441.185.869	100	50,07	100	10.441.185.869				
		3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	156	30.015.500.000			156	20.588.461.774		4.226.385.035		6.133.505.834			10.359.890.869		50,32	0	10.359.890.869					
		3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	650.000.000			1	266.078.400		27.800.000		53.495.000		0	81.295.000		30,55	0	81.295.000					
		3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi BMD	%	100	515.000.000	100		100	84.554.400	100	28.484.650	100	23.637.800			100	52.122.450	100	61,64	100	52.122.450				

	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	250.000.000		0	0								0	0		
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	265.000.000		2	84.554.400	28.484.650		23.637.800		0	52.122.450		61,64	0	52.122.450	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	660.000.000	100	100	85.355.850	100	11.865.000	100	21.590.000		100	33.455.000	100	39,19	100	33.455.000
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	325	230.000.000		0	0								0	0		
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	150.000.000		2	6.000.000			2.090.000		0	2.090.000		34,83	0	2.090.000	
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	280.000.000		200	79.355.850		11.865.000		19.500.000		31.365.000		39,52	0	31.365.000	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Dipenuhi	%	100	1.191.000.000	100	100	168.387.025	100	74.496.200	100	86.694.210		100	161.190.410	100	95,73	100	161.190.410
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	25.000.000		0	0								0	0		
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	300.000.000		20	0	300.000		13.906.760		0	14.206.760		0	0	14.206.760	
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	120.000.000		0	0					0			0	0		
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	35.000.000		3	6.827.125	2.788.000		2.839.000			5.627.000		82,42	0	5.627.000	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	65.000.000	0	5	34.559.900	31.799.900		2.760.000		0	34.559.900		100	0	34.559.900	
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	15.000.000		1	2.000.000	413.000		587.000			1.000.000		50	0	1.000.000	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	550.000.000		12	125.000.000	39.195.300		66.601.450		0	105.796.750		84,64	0	105.796.750	
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	81.000.000		1	0								0	0		
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan DKP	Laporan	6	2.180.000.000	2	6		2	1			1	16,67	nan	3			
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	450.000.000		0	0					0			0	0		
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	650.000.000		0	0					0			0	0		
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	180.000.000		0	0					0			0	0		

		3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	60	280.000.000		60	204.178.000		31.823.600		52.060.000					83.883.600		41,08	0	83.883.600
		3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir dalam Perda RTRWP	Dokumen	1	0		0	0											0	0	
		3.25.02.1.01.0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	65.000.000		0	0											0	0	
		3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	25	60.000.000		0	0											0	0	
		3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen	1	200.000.000		0	0											0	0	
		3.25.02.1.01.0011	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok Masyarakat	5	65.000.000		0	0											0	0	
		3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Terbitnya Dokumen perizinan yang sesuai dengan RZWP3K	Izin	2	120.000.000	0	2										0		nan	0	
		3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	60.000.000		2	0											0	0	
		3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	60.000.000		2	0											0	0	
		3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir	Kelompok	30	260.000.000	0	30										0		nan	0	
		3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	60	65.000.000		60	0											0	0	
		3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	8	75.000.000		8	0											0	0	

	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	5	120.000.000		3	0								0	0	
	03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	52.400	18.720.000.000	0	46.467	1.820.813.994	101.658.000	243.848.300			0	345.506.300	18,98	0	345.506.300	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap di laut	Ton	45.600	11.210.000.000	0	42.347	1.133.275.500	55.798.000	160.642.200			0	216.440.200	19,1	0	216.440.200	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Dokumen	1	50.000.000		1	0							0	0		
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	100	8.420.000.000		100	1.133.275.500	50.233.000	150.613.100			0	200.846.100	17,72	0	200.846.100	
	3.25.03.1.01.0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit	10	1.450.000.000		0	0							0	0		
	3.25.03.1.01.0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit	10	500.000.000		0	0							0	0		
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	10	790.000.000		0	0	5.565.000	10.029.100			15.594.100	0	0	15.594.100		
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD)	Ton	6.800	4.050.000.000	0	4.120	444.129.300	5.565.000	10.029.100			0	15.594.100	3,51	0	15.594.100	
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	1	50.000.000		0	0							0	0		
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	50	4.000.000.000		50	444.129.300	5.565.000	10.029.100			0	15.594.100	3,51	0	15.594.100	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang Terbit	SIP/SIKPI	1	450.000.000	0	1					0		nan	0			
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persen	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha	65	200.000.000		0	0							0	0		

	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Dokumen	1	250.000.000		0	0									0	0	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen	2	60.000.000	0	2										0	nan	0
	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	1	30.000.000		0	0									0	0	
	3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Dokumen	1	30.000.000		0	0									0	0	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang berubah di pelabuhan perikanan	Kapal	4.460	2.950.000.000	0	4.180	243.409.194	40.295.000	73.177.000			0	113.472.000			46,62	0	113.472.000
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	2	2.500.000.000		2	0									0	0	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	2	450.000.000		2	243.409.194	40.295.000	73.177.000			0	113.472.000			46,62	0	113.472.000
	03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	60.912	17.374.000.000	0	50.937,70	1.740.539.250	148.839.700	284.317.400			0	433.157.100			24,89	0	433.157.100
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pembudidayaan ikan yang Terbit	Izin Usaha	1	650.000.000	0	1						0				nan	0	
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	300.000.000		0	0					0				0	0	
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1	350.000.000		0	0									0	0	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Kegiatan	2	4.074.000.000	0	2	135.112.400	25.370.200	39.366.000			0	64.736.200			47,91	0	64.736.200
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	5	720.000.000		0	0					0				0	0	

		3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	60	250.000.000		0	0						0		0	0		
		3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budi daya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	10	1.500.000.000		2	135.112.400		25.370.200		39.366.000			64.736.200		47,91	0	64.736.200
		3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	1	1.604.000.000		0	0									0	0	
		3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Penyisipan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kegiatan	2	12.650.000.000	0	2	1.605.428.850		123.469.500		244.951.400		0	368.420.900		22,95	0	368.420.900
		3.25.04.1.06.0003	Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15	3.650.000.000		15	273.383.300		36.085.700		43.408.000		0	79.494.700		29,08	0	79.494.700
		3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	100	9.000.000.000		100	1.332.043.550		87.383.800		201.542.400		0	288.926.200		21,69	0	288.926.200
		03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	Hektar	5.711,22	5.000.000.000	0		11.213,36	296.465.300		39.245.000		88.027.000		127.272.000		42,93	0	127.272.000
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	Persen	68	4.035.000.000		60	288.965.300		39.245.000		88.027.000			127.272.000		44,04	0	127.272.000
		3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Unit	1	385.000.000		2	0									0	0	
		3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan sampai keputuhannya sesuai kewenangan provinsi dengan 12 mil yang diperiksa	Pelaku Usaha	6	750.000.000		2	288.965.300		39.245.000		88.027.000			127.272.000		44,04	0	127.272.000
		3.25.05.1.01.0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	2	2.300.000.000		0	0						0			0	0	
		3.25.05.1.01.0016	Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa keputuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	6	300.000.000		2	0						0			0	0	
		3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	2	300.000.000		2	0						0			0	0	

	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	Persen	90	965.000.000		84	7.500.000									0	0		
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	2	250.000.000		2	0									0	0		
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	2	450.000.000		2	7.500.000									0	0		
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	2	265.000.000		2	0									0	0		
	03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kp/Thn	31,07	8.300.000.000		28,07	672.961.220	81.952.000	179.085.100							261.037.100	38,81	0	261.037.100
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Izin	2	2.100.000.000	0	2	324.845.400	45.867.000	110.256.000							156.123.000	48,06	0	156.123.000
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	3	1.250.000.000		3	324.845.400	45.867.000	110.256.000							156.123.000	48,06	0	156.123.000
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Rekomendasi	3	850.000.000		3	0									0	0		
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Kelompok	10	1.750.000.000	0	10	197.537.440	27.200.000	51.379.100							78.579.100	39,78	0	78.579.100

		3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	3	500.000.000			3	110.814.800		15.710.000		26.789.000					0	42.499.000		38,35	0	42.499.000
		3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	2	1.250.000.000			2	86.722.640		11.490.000		24.590.100					0	36.080.100		41,6	0	36.080.100
		3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi pengolahan hasil perikanan	Dokumen	1	4.450.000.000	0		1	150.178.380		8.885.000		17.450.000				0	26.335.000		17,54	0	26.335.000	
		3.25.06.1.03.0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Sistem Informasi	1	300.000.000			1	0											0	0		
		3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha	Dokumen	1	3.750.000.000			1	150.178.380		8.885.000		17.450.000				0	26.335.000		17,54	0	26.335.000	
		3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Unit Usaha	10	400.000.000			10	0								0			0	0		

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Dari Tabel 2.1. di atas dapat dijelaskan bahwa capaian fisik hanya sebatas capaian kegiatan rutin, akan tetapi kegiatan fisik penunjang utama kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan masih belum terealisasi, hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan fisik masih dalam tahap proses pengadaan.

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sampai dengan Triwulan II belum optimal disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap belum optimal disebabkan beberapa faktor antara lain:
 - a. Penggunaan alat tangkap lampara dasar yang telah dilarang penggunaannya sesuai dengan Permen KP NOMOR 71/PERMENKP/2016;
 - b. Perubahan dari siklus hidup ikan yang sudah mulai mengalami penurunan dari tahun ke tahun;
 - c. Musim yang tidak menentu atau perubahan cuaca yang tidak merata, sehingga kebanyakan nelayan dengan armada kecil tidak melaut;
 - d. Alat tangkap maupun kapal yang kecil (rata-rata >3 GT) sehingga menyebabkan nelayan tidak mampu beroperasi di wilayah penangkapan yang jauh dari pantai, meskipun secara potensi masih cukup besar area penangkapan ikan.
2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya belum optimal disebabkan beberapa faktor antara lain:
 - a. Sarana dan prasarana perikanan budidaya belum memadai;
 - b. Terbatasnya sarana produksi pembudidaya;
 - c. Banyaknya lahan budidaya yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian (perkebunan);
 - d. Mahalnya harga pakan di pasaran, dimana masyarakat belum maksimal dalam pembuatan pakan mandiri, sehingga dapat mengurangi biaya dalam pembelian pakan;
 - e. Penerapan teknologi tepat guna masih didominasi pola tradisional.

Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tindak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :

- a. Pemerintah masih mengkaji ulang terhadap PERMEN KP NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 yang diharapkan ada solusi jenis alat tangkap pengganti yang lebih ramah lingkungan;
- b. Memberikan bantuan kapal 5 GT keatas kepada kelompok masyarakat nelayan (KUB);
- c. Zona tangkapan ikan yang sangat terbatas terkait (UU No. 23 Tahun 2014);
- d. Pembinaan terhadap masyarakat penangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak terhadap biota-biota yang ada di laut dan sungai;

- e. Meningkatkan kegiatan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran;
 - f. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui petugas teknis dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh PPL perikanan terhadap kegiatan perikanan laut dan juga budidaya perikanan payau atau tawar;
 - g. Penerapan teknologi tepat guna budidaya air payau dan air tawar;
 - h. Normalisasi saluran tambak dan kolam air tawar;
 - i. Bantuan bibit ikan air tawar dan bibit ikan air payau;
 - j. Bantuan sarana dan prasarana terhadap pembudidaya ikan;
 - k. Peningkatan kapasitas pembudidaya;
 - l. Peningkatan kapasitas aparatur (SDM);
3. Belum optimalnya Infrastruktur seperti jalan dan listrik di daerah yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Jaringan jalan dan listrik di Sentra Produksi perikanan, khususnya perikanan budidaya tambak yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung jabung Timur sampai saat ini masih belum terhubung sampai ke daerah usaha pertambakan, sehingga dalam pengembangan dan pemanfaatannya masih menggunakan cara tradisional dalam usaha budidaya tambak (Udang dan Bandeng).

Upaya perbaikan atau solusi untuk mengatasi masalah atau hambatan tersebut adalah diupayakan untuk segera memenuhi Infrastruktur tersebut, khususnya jaringan listrik, dimana jaringan listrik sangat diperlukan untuk usaha budidaya secara intensif maupun semi intensif, demi meningkatkan jumlah produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya tambak.

4. Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, seperti :
- a. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan (Nelayan dan pembudidaya ikan), dimana nelayan, khususnya Nahkoda kapal banyak yang belum mempunyai sertifikat nahkoda, sehingga nahkoda kapal belum mampu mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan, seperti penggunaan *GPS Fishfinder*, sedangkan pembudidaya ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan usaha sampingan dan bukan usaha utama, sehingga pengetahuan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) masih sangat minim, dari permasalahan tersebut menyebabkan hasil produksi usaha perikanan belum maksimal dan belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.
 - b. Masih terbatasnya tenaga ahli pembenihan ikan, sehingga sebagian besar benih ikan masih didatangkan dari luar daerah.

Upaya perbaikan atau solusi untuk mengatasi masalah atau hambatan tersebut adalah :

- a. Perlu adanya pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan). Pelatihan yang dimaksud berupa, pelatihan kepada nelayan, khususnya nahkoda kapal untuk mendapatkan sertifikat nahkoda, sehingga dalam pengoperasionalan kapal perikanan dapat maksimal dan menghasilkan peningkatan jumlah tangkapan dan pelatihan kepada pembudidaya ikan berupa pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan pelatihan pembuatan pakan mandiri, dimana dalam budidaya ikan, porsi kebutuhan pakan mencapai 60-70% dari mulai tanam sampai panen.
 - b. Perlu penambahan tenaga ahli pembenihan dan pelatihan pembenihan di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga dengan bertambahnya tenaga ahli pembenihan diharapkan kebutuhan benih di daerah dapat terpenuhi dalam daerah.
5. Belum optimalnya pengaplikasian iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi; Penjabaran dari permasalahan ini adalah :
- a. Dalam usaha penangkapan ikan belum mampu membuat inovasi penangkapan ikan yang dapat meningkatkan jumlah produksi dan peningkatan pendapatan nelayan.
 - b. Dalam usaha budidaya inovasi dalam pengaplikasian teknologi budidaya ikan belum maksimal, khususnya aplikasi budidaya ikan dalam kolam terpal (biflog)
 - c. Inovasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih minim, sehingga daerah belum mampu menjual hasil pengolahan perikanan secara massif.

Upaya perbaikan atau solusi untuk mengatasi masalah atau hambatan tersebut adalah :

- a. Perlu adanya kerjasama secara intens dengan instansi peneliti untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan, seperti kerja sama dengan Universitas dan LIPI, sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama ini dihasilkan inovasi penangkapan ikan yang dapat memberikan manfaat kepada nelayan, selain itu juga kerjasama dengan lembaga keuangan seperti Bank sangat perlu, dimana Bank sebagai lembaga yang memiliki modal diharapkan Bank dapat membantu perkreditan dengan bunga ringan dan membantu untuk mengontrol keuangan nelayan, sehingga dengan adanya control dari Bank ini dapat diketahui nelayan yang dibantu oleh pemerintah apakah penghasilannya dapat meningkat atau tidak.
- b. Pengembangan teknologi budidaya ikan dalam kolam terpal (Bioflog) diharapkan dapat diaplikasikan sesuai dengan SoP, selain itu juga dalam peningkatan produksi budidaya ikan di Daerah alangkah baiknya ada pencaangan dari pemerintah kepada masyarakat untuk menggalakkan *One Home one Pond* atau satu Rumah Satu Kolam

(Pemanfaatan Pekarangan Rumah), sehingga dengan adanya penggalakan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan protein hewani dari ikan dalam keluarga sehingga angka konsumsi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat meningkat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pilihan yang tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang perikanan. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dilihat dari capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagaimana tertera pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Renja Tahun 2025			Keterangan
						Target	Realisasi	Persentase	
1	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)			99,32	100,26	99,68	99,42	
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) (Nilai)			101,94	102,15	101,83	99,69	
		Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/Trip/Tahun)	193,61	197,92	193	97,51		
			Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Unit Kolam/Tahun)	1,21	1,21	1,13	93,39		

Dilihat dari table diatas, kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Triwulan II tahun 2025, indikator sasaran tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator dengan rata-rata persentase capaian sasaran sebesar 95,57%.

Secara umum dalam menjalankan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan pasti terdapat kendala/hambatan yang dihadapi. Beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang perikanan dan kelautan. Hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi**

Tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran dari Program yang dimiliki dalam bidang sekretariat

➤ **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Permasalahan utama dalam menjalankan program ini adalah terbitnya UU No.11/2020 bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28/2021 Pasal 139 (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan di Perairan Pesisir kepada Gubernur sepanjang RZWP3K telah integrasi dengan RTRWP. dan sedangkan untuk kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya anggaran yang secara khusus diperuntukkan merealisasikan kegiatan.

Adapun solusi yang mungkin bisa dilakukan sebagai tindak lanjut dalam menaggulangi permasalahan tersebut adalah merubah satuan dari izin menjadi rekomendasi seraya menunggu peraturan turunan dari UU No. 11/2020 dan mengalokasikan anggaran pada tahun berjalan maupun tahun yang akan datang dalam upaya mewujudkan kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan di Provinsi Jambi.

➤ **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80 % sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT. Solusinya yaitu dengan memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas.

Selain itu, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah masih adanya pelanggaran penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik yang tidak ramah lingkungan di wilayah perairan Provinsi Jambi. Solusinya yaitu dengan secara bertahap membina dan mensosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2

tahun 2015 tentang "Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" kepada para nelayan, serta secara berangsur-angsur mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Namun, jikalau nelayan atau pelaku pelanggar penangkapan ikan masih terindikasi menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Adapun solusi yang mungkin bisa dilakukan sebagai tindak lanjut dalam meanggulangi permasalahan tersebut adalah :

- 1). Perlu diadakannya kajian mendalam tentang potensi ikan di daerah pantai, sehingga kedepan dalam pengambilan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan tepat sasaran, terutama masalah penggunaan kapal penangkap ikan;
- 2). Merevitalisasi Alat Tangkap Penangkap Ikan yang dianjurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3). Berinovasi dalam pemilihan alat tangkap sesuai dengan daerah di Provinsi Jambi;
- 4). Pelatihan teknologi penangkapan ikan yang tepat guna dan tepat sasaran;
- 5). Pelatihan manajemen Koperasi/KUB yang baik dan berkelanjutan.

➤ **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khususnya kualitas air di sungai yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA). Solusinya adalah dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi.

Adapun solusi yang mungkin bisa dilakukan sebagai tindak lanjut dalam meanggulangi permasalahan tersebut adalah :

- 1). Melakukan perekrutan ahli pembenihan ikan.
- 2). Pembentukan kelompok pembudidaya ikan dari pemula menjadi pembudidaya yang handal.
- 3). Maksimalkan pemberdayaan kepada UPR, masyarakat pembudidaya ikan skala kecil dengan memberikan pelatihan, sapras budidaya, dan lain lain, karena dengan diberdayakan UPR secara maksimal, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kebutuhan benih ikan dapat terpenuhi dalam daerah sendiri.
- 4). Pemberian bantuan benih ikan dan pakan yang berkualitas.

➤ **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**

Permasalahan utama dalam mensukseskan program ini yaitu masih maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri yang tidak bertanggungjawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi tangkapan perairan umum solusinya yaitu dengan meningkatkan upaya bersama dari pihak terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang arti pentingnya menjaga kelestarian alam.

Selain itu, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran di bidang penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumber daya ikan, sehingga perlu meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya dengan mengembangkan dan meningkatkan lagi potensi masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) serta edukasi atau sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perikanan.

➤ **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, mutu, kualitas, dan diversifikasi produk serta sertifikasi bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih belum maksimal sehingga masih belum bisa bersaing dan merebut pasar. Solusi atas kendala tersebut adalah dengan lebih meningkatkan mutu, kualitas, diversifikasi produk serta meningkatkan sertifikasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Hambatan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu strategi yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

2.3.1.1. Sekretariat

- Penempatan personil yang belum disesuaikan dengan kompetensi, keahlian dan latar belakang pendidikan;
- Pendelegasian wewenang yang belum jelas sesuai dengan TUPOKSI-nya, akan mengakibatkan pertanggung jawaban yang kurang memadai dan menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang tumpang-tindih;
- Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih terbatas.

2.3.1.2. Bidang Budidaya & Pengembangan Teknologi Perikanan

- Belum terpenuhinya benih ikan dalam daerah, sehingga sampai saat ini masih mendatangkan benih dari luar daerah;
- Kurang termotivasinya masyarakat dalam usaha budidaya ikan;
- Menurunnya daya dukung lahan /sumber air sebagai media budidaya, sehingga produksi ikan budidaya kurang optimal;
- Daya saing produk perikanan budidaya yang masih rendah, hal ini dikarenakan dalam pengelolaan pasca pemeliharaan hingga proses penanganan hasil produksi sebagian besar belum dilakukan secara CBIB;
- Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha budidaya ikan dalam akses permodalan;
- Kualitas pembudidaya rata-rata masih rendah, dimana pekerjaan pembudidaya merupakan pekerjaan informal, sehingga pekerjaan ini bukan merupakan pekerjaan pokok.
- Masih kurangnya pemberdayaan/pelatihan budidaya ikan kepada masyarakat;
- Masih rendahnya pemberdayaan UPR, sehingga belum ada UPR baru yang terbentuk;
- Mahalnya harga pakan ikan yang ada di pasaran;
- Masih minimnya tenaga ahli yang kompeten di bidang budidaya.

2.3.1.3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap

- Kapal penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar masih menggunakan perahu tradisional dengan dayung dan atau motor kecil, sehingga penangkapan ikan masih terbatas di sekitar pantai;
- Sarana dan prasarana dermaga pendaratan ikan hasil tangkapan yang belum optimal, sehingga nelayan masih jarang yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI yang telah dibangun oleh pemerintah.
- Lembaga keuangan yang melayani kepentingan usaha rakyat (mitra usaha), baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank masih sangat terbatas;
- Masih minimnya kesadaran masyarakat nelayan akan kelestarian lingkungan;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat pesisir akan kewirausahaan dan kemandirian;

- Belum optimalnya penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga berdampak pada rusaknya wilayah pesisir dan laut;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan pesisir dan laut;
- Belum optimalnya pemberdayaan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
- Masih sulitnya pengurusan izin usaha perikanan lebih dari 30 GT dari pusat;

2.3.1.4. Bidang Pengawasan & Penguatan Daya Saing Produk

- Belum optimalnya pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sehingga masih banyak pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Masih minimnya pengetahuan SDM akan peraturan perundang-undangan tentang sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Masih tingginya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Daya saing produk perikanan tangkap yang masih rendah, dimana produk perikanan tangkap masih kalah tenar dengan produk pangan lainnya, seperti daging sapi dan daging ayam;
- Masih kurangnya inovasi ragam olahan hasil perikanan, sehingga masih banyak dipasaran produk yang dijual masih dalam bentuk ikan hasil tangkapan;
- Sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang belum memadai;
- Masih minimnya pengetahuan SDM packaging dan pengolahan hasil perikanan;
- Pemasaran hasil produksi, terutama komoditi hasil perikanan masih belum maksimal.

2.3.2. Kondisi yang Diinginkan

Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, maka diharapkan dapat mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

2.3.2.1. Sekretariat

- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam penanganan kewenangan;
- Sesuaiinya penempatan personil dengan kompetensi keahlian dan latar belakang pendidikan;
- Meningkatnya rasa tanggung jawab SDM sesuai dengan TUPOKSI, sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak umpang tindih dan monoton;
- Meningkatkan pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan pendanaan dalam pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

2.3.2.2. Bidang Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan

- Meningkatkan pengetahuan SDM dalam bidang perikanan, khususnya di bidang perikanan budidaya, untuk tercapai sasaran yang diinginkan;
- Harus adanya pemberdayaan yang optimal untuk dalam produksi benih ikan secara mandiri;
- Harus adanya inovasi dalam mengembangkan produk hasil perikanan budidaya, berupa diversifikasi hasil olahan;
- Harus adanya kebijakan khusus dalam peningkatan akses modal untuk pembudidaya ikan;
- Perlu adanya peningkatan SDM pembudidaya ikan di kelembagaan kelompok untuk menjadi Kelompok Pembudidaya ikan mandiri;
- Adanya pelatihan kepada masyarakat pembudidaya ikan dalam membuat pakan sendiri, sehingga permasalahan mahalnnya pakan ikan bisa teratasi;
- Meningkatkan tenaga ahli yang kompeten di bidang budidaya;

2.3.2.3. Bidang Pengelolaan Ruang lajut dan Perikanan Tangkap

- Meningkatkan kapal penangkapan ikan yang dapat beroperasi dilepas pantai (Laut Natun dan Laut China Selatan);
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya akan pelestarian alam, sehingga permasalahan minimnya hasil tangkapan dapat teratasi;

- Perbaikan sarana dan prasarana dermaga pendaratan ikan (PPI) harus dilakukan, sehingga nelayan banyak yang mendaratkan hasil tangkapannya di dermaga yang telah dibangun oleh Pemerintah.
- Harus adanya inovasi dalam mengembangkan produk hasil perikanan tangkap, berupa diversifikasi hasil olahan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir akan kewirausahaan dan kemandirian;
- Meningkatkan lembaga keuangan yang melayani kepentingan usaha rakyat (mitra usaha) baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan modal usaha;
- Tersusunnya rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga kedepan arah kebijakan pembangunan pesisir dan laut tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan pesisir dan laut, sehingga masyarakat punya tanggung jawab akan lingkungannya;
- Meningkatkan pemberdayaan pada kelompok nelayan;
- Adanya kemudahan pengurusan izin usaha perikanan lebih dari 30 GT dari pusat, sehingga hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat;

2.3.2.4. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk

- Meningkatkan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat ditekan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan yang memadai;
- Meningkatkan pengetahuan SDM akan packaging dan pengolahan hasil perikanan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pemasaran komoditi hasil perikanan.
- Meningkatkan pengetahuan SDM akan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Renja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki persamaan dengan RKPD Provinsi Jambi, dalam hal program dan kegiatan akan tetapi pagu indikatif tidak sesuai dengan RKPD Final, hal ini disebabkan antara lain:

1. Banyak usulan awal masyarakat yang tidak bisa diakomodasi dalam dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;
2. Menurunnya status tipologi Dinas, yang semula Dinas Perikanan bertipologi A, sejak tahun 2017 menjadi Tipe B;
3. Evaluasi program dan kegiatan prioritas oleh Tim TAPD, karena prioritas pembangunan Provinsi Jambi pada Tahun 2026 memprioritaskan pembangunan infrastruktur Dasar, seperti jalan, jembatan dan Air bersih.

Review terhadap RKPD Tahun 2026 Provinsi Jambi dapat dilihat dalam Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Renja Akhir Tahun 2026			Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	3	4		5	6		7	9	10
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		86,76	22.225.755.104		86,76	22.225.755.104	
		Nilai AKIP Perangkat daerah (Nilai)		78,26 (BB)			78,26 (BB)		
		Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)		71			71		
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan (%)	Provinsi Jambi	90	319.171.710		90	319.171.710	
		Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan (%)		90			90		
		Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja (%)		95			95		
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	3 Dokumen	99.073.100		3 Dokumen	99.073.100	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0		2 Dokumen	0	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	10 Laporan	62.391.460		10 Laporan	62.391.460	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	1 Laporan	157.707.150		1 Laporan	157.707.150	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang Difasilitasi	Provinsi Jambi	100	20.854.540.174		100	20.854.540.174	

3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	151 Orang/Bulan	20.588.461.773,94	Provinsi Jambi	151 Orang/Bulan	20.588.461.773,94	
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	1 Dokumen	266.078.400	Provinsi Jambi	1 Dokumen	266.078.400	
3.25.01.1.03	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi BMD	Provinsi Jambi	100%	84.554.400	Provinsi Jambi	100%	84.554.400	
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	2 Laporan	84.554.400	Provinsi Jambi	2 Laporan	84.554.400	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi kepegawaian	Provinsi Jambi	100	85.355.850	Provinsi Jambi	100	85.355.850	
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Jambi	325 Paket	0	Provinsi Jambi	325 Paket	0	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	20 Orang	6.000.000	Provinsi Jambi	20 Orang	6.000.000	
3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	200 Orang	79.355.850	Provinsi Jambi	200 Orang	79.355.850	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Dipenuhi	Provinsi Jambi	100	189.920.551	Provinsi Jambi	100	189.920.551	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Paket	0	Provinsi Jambi	10 Paket	0	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	20 Paket	21.533.590	Provinsi Jambi	20 Paket	21.533.590	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	0	Provinsi Jambi	5 Paket	0	

3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	3 Paket	6.827.100	Provinsi Jambi	3 Paket	6.827.100	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	34.559.900	Provinsi Jambi	5 Paket	34.559.900	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	1.999.961	Provinsi Jambi	1 Dokumen	1.999.961	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	12 Laporan	125.000.000	Provinsi Jambi	12 Laporan	125.000.000	
3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan DKP	Provinsi Jambi	6 Laporan	0	Provinsi Jambi	6 Laporan	0	
3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Unit	0	Provinsi Jambi	5 Unit	0	
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Unit	0	Provinsi Jambi	1 Unit	0	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	0	Provinsi Jambi	5 Paket	0	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Unit	0	Provinsi Jambi	10 Unit	0	
3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Unit	0	Provinsi Jambi	1 Unit	0	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	8 Unit	0	Provinsi Jambi	8 Unit	0	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Dipenuhi	Provinsi Jambi	90	534.108.119	Provinsi Jambi	90	534.108.119	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	1 Laporan	1.000.000	Provinsi Jambi	1 Laporan	1.000.000	

3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Jambi	12 Laporan	533.108.119	Provinsi Jambi	12 Laporan	533.108.119	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	Provinsi Jambi	100	158.104.300	Provinsi Jambi	100	158.104.300	
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Jambi	59 Unit	79.133.700	Provinsi Jambi	59 Unit	79.133.700	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Jambi	4 Unit	71.280.500	Provinsi Jambi	4 Unit	71.280.500	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	3 Unit	0	Provinsi Jambi	3 Unit	0	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	20 Unit	7.690.100	Provinsi Jambi	20 Unit	7.690.100	
03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Tangkap terhadap PDRB (%)		2,17	851.905.200		2,17	851.905.200	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Wilayah Perairan yang Dikelola berdasarkan RZWP3K	Provinsi Jambi	27%	851.905.200	Provinsi Jambi	27%	851.905.200	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Provinsi Jambi	5715,13 Ha	647.727.200	Provinsi Jambi	5715,13 Ha	647.727.200	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Provinsi Jambi	627,2 Ha	0	Provinsi Jambi	627,2 Ha	0	

3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	60 Orang	204.178.000	Provinsi Jambi	60 Orang	204.178.000	
3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	
3.25.02.1.01.0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	1 Kegiatan	0		1 Kegiatan	0	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Provinsi Jambi	25 Pelaku Usaha	0		25 Pelaku Usaha	0	
3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	0	
3.25.02.1.01.0011	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Provinsi Jambi	5 Kelompok masyarakat	0		5 Kelompok masyarakat	0	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Terbitnya Dokumen perizinan yang sesuai dengan RZWP3K	Provinsi Jambi	2 Izin	0	Provinsi Jambi	2 Izin	0	

3.25.02.1.02.0004	<i>Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir</i>	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	2 Rekomendasi	0	Provinsi Jambi	2 Rekomendasi	0
3.25.02.1.02.0007	<i>Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan</i>	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir	Provinsi Jambi	30 Kelompok	0	Provinsi Jambi	30 Kelompok	0
3.25.02.1.03.0001	<i>Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi Jambi	60 Orang	0	Provinsi Jambi	60 Orang	0
3.25.02.1.03.0002	<i>Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	8 Kelompok	0	Provinsi Jambi	8 Kelompok	0
3.25.02.1.03.0004	<i>Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	20 Orang	0	Provinsi Jambi	20 Orang	0
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		47.500	1.820.804.909		47.500	1.820.804.909
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap di laut	Provinsi Jambi	41.247 Ton	1.133.275.500	Provinsi Jambi	41.247 Ton	1.133.275.500
3.25.03.1.01.0001	<i>Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</i>	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.03.1.01.0002	<i>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</i>	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2500 Unit	1.133.275.500	Provinsi Jambi	2500 Unit	1.133.275.500

3.25.03.1.01.0005	<i>Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur</i>	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Provinsi Jambi	0 Unit	0	Provinsi Jambi	0 Unit	0
3.25.03.1.01.0007	<i>Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur</i>	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		0 Unit	0		0 Unit	0
3.25.03.1.01.0010	<i>Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap</i>	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		0 Unit	0		0 Unit	0
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD)	Provinsi Jambi	5,300 Ton	444.129.300	Provinsi Jambi	5,300 Ton	444.129.300
3.25.03.1.02.0001	<i>Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</i>	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.03.1.02.0004	<i>Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</i>	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	355 Unit	444.129.300	Provinsi Jambi	355 Unit	444.129.300
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang Terbit	Provinsi Jambi	1 SIPI/SIKPI	0	Provinsi Jambi	1 SIPI/SIKPI	0
3.25.03.1.03.0004	<i>Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil</i>	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Provinsi Jambi	65%	0	Provinsi Jambi	65%	0

3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	0	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0		2 Dokumen	0	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	0	
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	0	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	Provinsi Jambi	4.350 Kapal	243.400.109	Provinsi Jambi	4.350 Kapal	243.400.109	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Provinsi Jambi	1 Unit	0	Provinsi Jambi	1 Unit	0	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Provinsi Jambi	2 Layanan	243.400.109	Provinsi Jambi	2 Layanan	243.400.109	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		51.082	1.467.155.100		51.082	1.467.155.100	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pembudidayaan ikan yang Terbit	Provinsi Jambi	1 izin usaha	0	Provinsi Jambi	1 izin usaha	0	

3.25.04.1.01.0002	<i>Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	0	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	0
3.25.04.1.01.0003	<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	135.112.400	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	135.112.400
3.25.04.1.05.0004	<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Jambi	5 Unit	0	Provinsi Jambi	5 Unit	0
3.25.04.1.05.0007	<i>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>	Jumlah Pembudidaya	Provinsi Jambi	60 orang	0	Provinsi Jambi	60 orang	0
3.25.04.1.05.0011	<i>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Provinsi Jambi	10 unit	135.112.400	Provinsi Jambi	10 unit	135.112.400
3.25.04.1.05.0012	<i>Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	1.332.042.700	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	1.332.042.700
3.25.04.1.06.0003	<i>Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	15 Unit	273.382.450	Provinsi Jambi	15 Unit	273.382.450

3.25.04.1.06.0004	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dia air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Provinsi Jambi	100 Unit	1.058.660.250	Provinsi Jambi	100 Unit	1.058.660.250
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)		10.772,33	296.465.300		10.772,33	296.465.300
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	Provinsi Jambi	60%	288.965.300	Provinsi Jambi	60%	288.965.300
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Provinsi Jambi	1 Unit	0	Provinsi Jambi	1 Unit	0
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan sampai kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi dengan 12 mil yang diperiksa	Provinsi Jambi	2 Pelaku Usaha	288.965.300	Provinsi Jambi	2 Pelaku Usaha	288.965.300
3.25.05.1.01.0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Provinsi Jambi	2 Unit	0	Provinsi Jambi	2 Unit	0
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		2 pelaku usaha	0		2 pelaku usaha	0
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		2 Kelompok Masyarakat	0		2 Kelompok Masyarakat	0
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	Provinsi Jambi	84%	7.500.000	Provinsi Jambi	84%	7.500.000

3.25.05.1.02.0004	<i>Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Jambi	2 pelaku usaha	0	Provinsi Jambi	2 pelaku usaha	0
3.25.05.1.02.0005	<i>Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi</i>	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Jambi	2 pelaku usaha	7.500.000	Provinsi Jambi	2 pelaku usaha	7.500.000
3.25.05.1.02.0006	<i>Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi</i>	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Jambi	2 plaku uasaha	0	Provinsi Jambi	2 plaku uasaha	0
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn)		28,67	672.561.220		28,67	672.561.220
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Provinsi Jambi	2 Izin	324.845.400	Provinsi Jambi	2 Izin	324.845.400
3.25.06.1.01.0004	<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Provinsi Jambi	3 Dokumen	324.845.400	Provinsi Jambi	3 Dokumen	324.845.400
3.25.06.1.01.0007	<i>Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar</i>	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Provinsi Jambi	3 Rekomendasi	0	Provinsi Jambi	3 Rekomendasi	0

3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Provinsi Jambi	10 Kelompok	197.537.440	Provinsi Jambi	10 Kelompok	197.537.440	
3.25.06.1.02.0003	<i>Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</i>	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Jambi	3 Kegiatan	110.814.800	Provinsi Jambi	3 Kegiatan	110.814.800	
3.25.06.1.02.0004	<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	86.722.640	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	86.722.640	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi pengolahan hasil perikanan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	150.178.380	Provinsi Jambi	1 Dokumen	150.178.380	
3.25.06.1.03.0001	<i>Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	
3.25.06.1.03.0002	<i>Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Provinsi Jambi	10 Unit Usaha	150.178.380	Provinsi Jambi	10 Unit Usaha	150.178.380	

3.25.06.1.03.0005	<i>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Provinsi Jambi	1 Sistem Informasi	0	Provinsi Jambi	1 Sistem Informasi	0	
JUMLAH TOTAL					27.334.646.833			27.334.646.833	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum OPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Forum Organisasi Perangkat daerah dengan OPD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan dengan Instansi/Lembaga terkait, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional.

Forum Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum OPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan Draf Rencana Kerja OPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi setiap tahun melaksanakan acara forum OPD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari *Bottom up* maupun *Top down*. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi semuanya memiliki kesamaan, sehingga dimungkinkan dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jambi. Proses selanjutnya, usulan-usulan tersebut kemudian di skala prioritas berdasarkan tingkat ketergesaan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat.

Adapun Rekap hasil pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 2.15 di bawah ini :

Tabel 2.15. Rekap hasil pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2026

1. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	paket percontohan budidaya lele dengan teknologi bioflok	4	Paket	100.000.000	400.000.000	Kec. Siulak, Kec. Siulak Mukai dan Kec. Danau Kerinci Barat	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	paket percontohan pakan mandiri	3	Paket	100.000.000	300.000.000	Kec. Sitingau Laut dan Kec. Danau Kerinci Barat	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Paket Pengadaan Budidaya Maggot	3	Paket	50.000.000	150.000.000	Kec. Siulak, Kec. Danau Kerinci Barat dan Kec. Air Hangat Timur	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
4	pelatihan/Bimtek untuk Pendamping Teknis Perikanan	10	Orang	2.000.000	20.000.000	Kab. Kerinci	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
5	Pelatihan/Bimtek untuk Pembudidaya Ikan	20	Orang	2.000.000	40.000.000	Kab. Kerinci	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Paket pengadaan Alat tangkap	10	Paket	30.000.000	300.000.000	Kec. Danau Kerinci dan Kec. Tanah Cogok	Y	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
7	Pengadaan Benih Ikan untuk Restocking di perairan umum (Danau/sungai)	5	Lokasi	30.000.000	150.000.000	Kec. Gunung Kerinci, Kec. Sitingau Laut dan Kec. Keliling Danau	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
8	Pembangunan Rumah Jaga Lubuk Larangan	3	Lokasi	20.000.000	60.000.000	Kec. Sitingau Laut dan Kec. Keliling Danau	Y	Akan diusulkan pada usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)
9	Pengadaan Sarpras Pengawasan ikan perairan Umum	5	Paket	20.000.000	100.000.000	Kec. Gunung Kerinci, Kec. Sitingau Laut dan Kec. Keliling Danau	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
10	Pengadaan Sarpras UPI	5	Paket	20.000.000	100.000.000	Kec. Air Hangat Timur dan Kec. Danau Kerinci Barat	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
11	Gemarikan	1	Paket	25.000.000	25.000.000	Kab. Kerinci	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
12	Pelatihan Pengolahan Perikanan	20	Orang	2.000.000	40.000.000	Kab. Kerinci	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
JUMLAH					1.685.000.000			

2. DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEBO								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan				117.500.000			
	- Pembinaan POKMASWAS	3	Kelompok	10.000.000	30.000.000	Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah, Desa Jambu Kec. Tebo Ulu, Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana POKMASWAS	1	Paket	20.000.000	20.000.000	Desa Sungai alai Kec. Tebo Tengah	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Restocking Benih Gurame	5000	Ekor	3.500	17.500.000	Danau Sigombak Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
	- Restocking Benih Tembakang	50000	Ekor	1.000	50.000.000	Danau Sigombak Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
2	Penguatan Daya Saing Produk Perikanan				52.000.000			
	- GEMARIKAN	50	Orang	400.000	20.000.000	Desa Teluk Pandak Kec. Tebo Tengah	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Bimtek Keamanan Pangan Hasil Perikanan	30	Orang	400.000	12.000.000	Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Penyediaan Sarana Pengolahan Bandeng Presto	1	Paket	20.000.000	20.000.000	Desa Pulung Rejo Kec. Rimbo Ulu	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Perikanan Budidaya				10.000.000			
	- Pengawasan Kesehatan Lingkungan	1	Paket	5.000.000	5.000.000	Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang	Y	Pada kegiatan kesehatan ikan
	- Pengawasan Hama Penyakit Ikan	1	Paket	5.000.000	5.000.000	Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang	Y	Pada kegiatan kesehatan ikan
4	Perikanan Tangkap				100.000.000			
	- Penyediaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	2	Paket	50.000.000	100.000.000	Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
JUMLAH					279.500.000			

3. DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BATANGHARI								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Produksi Perikanan Budidaya				2.030.000.000			
1	Pengadaan Paket Bak bulat, Bibit dan Pakan	20	Unit	8.000.000	160.000.000	Kecamatan Pelayung	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
2	Pengadaan Benih Nila dan Pakan untuk KJA	25	Paket	20.000.000	500.000.000	Kecamatan Muara Bulian Desa Aro	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Pembangunan Gudang pakan mandiri	3	Unit	100.000.000	300.000.000	Kecamatan Pelayung	T	Akan diusulkan melalui DAK
4	Pengadaan Mesin Pakan Mandiri	5	Unit	40.000.000	200.000.000	Kecamatan Pelayung	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
5	Paket Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Gurame, Patin dan Lele)	10	Paket	50.000.000	500.000.000	8 Kecamatan Kab. Batang Hari	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Pengadaan Induk Patin, Lele dan Peralatan UPR	2	Paket	80.000.000	160.000.000	Kecamatan Pelayung, Muara Bulian	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
7	Mesin sedot Air Lumpur	3	Paket	70.000.000	210.000.000	Kecamatan Pelayung, Muara Bulian	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
II	Pengelolaan Perikanan Tangkap				200.000.000			
8	Pengayaan stok ikan lokal (restocking)	200.000	Ekor	50.000.000	50.000.000	3 Kecamatan Kab. Batang Hari	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
9	Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan	3	Paket	50.000.000	150.000.000	3 Kecamatan Kab. Batang Hari	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
JUMLAH					2.230.000.000			

4. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produksi perikanan budidaya belum optimal							
1	Bantuan calon induk dan pakan ikan nila dan gurami	1	Paket			Ds. Babeko Kec. Bathin II Babeko	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		1	Paket			Ds. Pasar Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		1	Paket			Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		1	Paket			Ds. Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal Lintas	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		1	Paket			Ds. Embacang Gedang, Kec Tanah Sepenggal Lintas	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		2	Paket			Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		2	Paket			Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
2	Pelatihan Pembudidayaan Ikan Lele dan Ikan Nila	4	Kali			Dalam Kabupaten Bungo	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Bantuan Mesin Pelet Ikan	2	Paket			Kec. Pelepat dan Kec. Pelepat Ilir	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	Produksi perikanan tangkap belum optimal							
1	Pengadaan Alat Tangkap untuk nelayan (Perahu dan alat tangkap ramah lingkungan)	20	Paket			Kec. Pelepat dan Kec. Tanah Sepenggal	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Pengadaan Alat Tangkap untuk nelayan (Perahu dan alat tangkap ramah lingkungan)	20	Paket			Kec. Jujuhan Ilir dan Bathin II Babeko	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Bantuan peralatan untuk Pokmaswas (Senter, Jas Hujan, Kartu tanda Anggota pokmaswas, HandPhone dan GPS)	2	Pokmaswas			Kec. Batin III Ulu dan Kec. Tanah Sepenggal	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	Pengadaan Benih untuk Restocking (Benih Semah dan Gurami)	300.000	ekor benih			Kabupaten Bungo	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

Pelatihan pengolahan hasil perikanan								
1	Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan asap (Oven, Kompor/tungku, Vacuum Seller dan Timbangan)	3	Paket			Ds. Dwi Karya Bakti, Ds. Embecang Gedang, Kel. Cadika	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Bantuan mesin Mixer dan Penggoreng abon ikan	1	Paket			Ds. Sungai Buluh	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Bantuan Ikan Konsumsi	1	Paket			Pesantren, Panti asuhan, Rumah Tahfis Qur'an dan Panti Jompo	T	Kegiatan yang merupakan pendukung pandemi Covid 19, kini tidak lagi dilaksanakan
4	Gemarikan	1	Paket			Kab Bungo	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
JUMLAH					-			

5. DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap							
1	Bantuan Alat Tangkap Jaring untuk pendukung Program KALAJU TA 2022	60	Paket	13.000.000	780.000.000	Desa Kuala Simbur Kecamatan Sabak Timur	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Bantuan Alat Tangkap Jaring untuk pendukung Program KALAJU TA 2023	150	Paket	13.000.000	1.950.000.000	Kel Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Bantuan Alat Tangkap Jaring	75	Paket	13.000.000	975.000.000	Kecamatan Kuala Jambi	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	Bantuan Alat Tangkap Jaring	75	Paket	13.000.000	975.000.000	Kecamatan Mendahara	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
5	Bantuan Alat Tangkap Jaring	75	Paket	13.000.000	975.000.000	Kecamatan Sabak Timur	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
6	Bantuan Alat Tangkap Jaring	75	Paket	13.000.000	975.000.000	Kecamatan Sadu	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	Sub Total I				6.630.000.000			
II	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya							

1	Sarpras budidaya lele	5	Paket	100.000.000	500.000.000	Kecamatan Mendahara dan Kuala Jambi	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Sarpras budidaya Udang Vaname	1	Paket	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Sadu	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
3	Sarpras Pembenihan Rakyat	2	Paket	130.000.000	260.000.000	Kecamatan Rantau Rasau	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
4	Sarpras Domestikasi Ikan lokal	3	Paket	130.000.000	390.000.000	Kecamatan Dendang dan Mend. Ulu	T	Diusulkan melalui Bidang Tangkap
5	Sarpras Budidaya Nila	5	Paket	100.000.000	500.000.000	Kecamatan Sabak Barat	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Sarpras Budidaya Payau	3	Paket	100.000.000	300.000.000	Kecamatan Sabak Timur dan Mend. Ilir	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
7	Indukan Nila	1	Paket	85.000.000	85.000.000	BBI Dendang	T	Akan diusulkan melalui DAK
8	Rehab kolam BBI	1	Paket	180.000.000	180.000.000	BBI Dendang	T	Akan diusulkan melalui DAK
9	Sarpras Budidaya Gurame	4	Paket	80.000.000	320.000.000	Kec.Berbak, Dendang dan Sabak Barat	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	Sub Total II				2.665.000.000			
III	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							
1	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklhasr Merpati (Jl.Orang kayo Hitam Rt.05/03 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklhasr Cahaya Laut (Jl.Orang kayo Hitam Rt.05/03 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklasar Ampera Indah (Jl.Diamond Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklhasr Mandiri 2 (Kel.Nipah panjang I Kec.Nipah Panjang)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
5	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklhasr Kelompok Usaha Bersama 3 (Lr Nelayan Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
6	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklhasr Mawar (Lr Nelayan Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
7	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklhasr Cahaya Kita (Lr Nelayan Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
8	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklhasr Adelia (Jl.Arjuna Rt.025/02 Kel.Mendahara Ilir Kec.Mendahara)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
9	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklhasr Usaha Berkah Sejahtera (Jl.Maju Jaya Rt.010/003 Kel.Tanjung Solok Kec.Kuala Jambi)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran

10	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklaksar Rezeki Harapan Sejahtera (Jl.Madrasah Rt.10/03 Kel.Kampung Laut Kec.Kuala Jambi)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
11	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklaksar Bunga Melati Indah (Dusun II Rt.004 Desa Majelis Hidayah Kec.Kuala Jambi)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
12	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklaksar Anugerah (Dusun II Rt.004 Desa Majelis Hidayah Kec.Kuala Jambi)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
13	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Paket	40.000.000	40.000.000	Poklaksar Cahaya (Dusun II Rt.004 Desa Majelis Hidayah Kec.Kuala Jambi)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
14	Rehab UPI dan Sarana Prasarana	1	Paket	150.000.000	150.000.000	Poklaksar Ciknah (Kel. Rano Kec.Muara Sabak Barat)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
15	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Kegiatan	30.000.000	30.000.000	Komplek Perkantoran Muara Sabak Kec.Muara Sabak Barat	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
16	Bantuan Peralatan di Rumah Kemasan (Komputer PC, Printer dan Bahan Kemasan)	1	Paket	150.000.000	150.000.000	Rumah Kemasan Dinas Perikanan (Kel.Talang Babat Kec.Muara Sabak Barat)	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Sub Total III					850.000.000			
JUMLAH					10.145.000.000			

6. DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Bidang Perikanan Tangkap				2.130.000.000			
1	BANTUAN ALAT PENANGKAPAN IKAN GILLNET 4 INCHI (JARING UDANG KETAK)	400	Paket	600.000	240.000.000	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	BANTUAN MESIN PENGGERAK KAPAL MOTOR	50	Unit	15.000.000	750.000.000	Kec. Tungkal Ilir	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	BANTUAN POMPONG, MESIN DAN ALAT TANGKAP GILLNET 4 INCHI	20	Paket	38.000.000	760.000.000	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	BANTUAN PERAHU, MESIN DAN ALAT TANGKAP GILLNET 2,5 INCHI	20	Paket	19.000.000	380.000.000	Kec. Seberang Kota	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
II	Bidang Perikanan Budidaya				590.000.000			

1	Bantuan paket budidaya ikan lele	8	Paket	25.000.000	200.000.000	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bram itam, Kec. Muara Papalik, Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Batang Asam	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Paket budidaya kerang darah di tambak	1	Paket	15.000.000	15.000.000	Desa Muara Sebrang Kec. Sebrang Kota	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Paket budidaya ikan patin	3	Paket	30.000.000	90.000.000	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Betara	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
4	Paket budidaya nila salin	1	Paket	50.000.000	50.000.000	Kec. Kuala Betara	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
5	Paket budidaya ikan nila	3	Paket	30.000.000	90.000.000	Kec. Betara dan Kec. Renah Mendaluh	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
6	Paket budidaya ikan gurame	2	Paket	35.000.000	70.000.000	Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
7	Bantuan bahan baku pakan	5	Paket	15.000.000	75.000.000	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Betara, Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Batang Asam	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
JUMLAH					2.720.000.000			

7. DINAS PERIKANAN KABUPATEN MERANGIN								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelatihan CBIB/CPIB kelompok pembudidaya ikan	10	Kelompok	20.000.000	200.000.000	Kabupaten Merangin	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Bantuan peralatan produksi perikanan budidaya kolam (untuk 10 kelompok pembudidaya ikan) Pengembangan budidaya magot	10	Paket	20.000.000	200.000.000	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
3	Bantuan benih dan pakan ikan untuk 35 kelompok pembudidaya ikan	350000	Ekor	500	175.000.000	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
4	Bantuan pakan ikan untuk 35 kelompok pembudidaya ikan							
	- Pakan starter	700	Kg	260.000	182.000.000	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Pakan grower min 2	7000	Kg	16.500	115.500.000	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Pakan grower min 3	14000	Kg	16.800	235.200.000	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024

5	Bantuan obat-obatan kesehatan ikan (untuk 20 kelompok pembudidaya perikanan)	20	Paket	10.000.000	200.000.000	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Restocking/penebaran benih ikan di perairan umum/danau/lubuk larangan	30	Paket	15.000.000	450.000.000	Kawasan lubuk larangan berdasarkan Peraturan Bupati Merangin	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
7	Bimbingan dan pelatihan kelompok pengolahan perikanan	4	Kelompok	20.000.000	80.000.000	Kec. Bangko, Tabir selatan dan Pamenang, Jangkat	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
8	Bantuan sarana pengolahan ikan untuk 3 kelompok pengolahan ikan (oven pengering, penggiling ikan, Oven pengasapan, Lantai jemur ikan kering)	4	Paket	50.000.000	200.000.000	Kec. Bangko, Tabir Selatan, Pamenang, Jangkat	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
JUMLAH					2.037.700.000			

8. DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUARO JAMBI								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang diusahakan dalam kabupaten/kota				1.160.000.000			
	a. Pengadaan perahu lengkap dengan mesin dan alat tangkap	50	Paket	16.000.000	800.000.000	Kec. Sekernan, Taman Rajo, Kumpeh, Jaluko, Kumpeh Ulu	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	b. Pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan							
	- Jala Tebar	100	Unit	1.200.000	120.000.000	Kec. Sekernan, Taman Rajo, Kumpeh, Jaluko, Kumpeh Ulu	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Jaring Insang lengkap dengan Timah dan tali	200	Unit	450.000	90.000.000	Kec. Kumpeh, Taman Rajo, Jaluko	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Kawat Tembilar	500	Gulung	300.000	150.000.000	Kec. Sekernan, Kumpeh, Kumpeh Ulu, Kec. Sekernan. Maro Sebo	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Restocking benih ikan di suaka perikanan / Lubuk Larangan / Perairan umum lainnya				460.000.000			

	- Ikan Jelawat	200.000	Ekor	700	140.000.000	Kec. Maro Sebo, Jaluko, Kumpeh Ulu	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
	- Ikan Tembakang	200.000	Ekor	600	120.000.000	Kec. Maro Sebo, Jaluko, Kumpeh Ulu	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
	- Ikan Baung	200.000	Ekor	1.000	200.000.000	Kec. Maro Sebo, Jaluko, Kumpeh Ulu	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana pemasaran hasil perikanan				380.000.000			
	a. Pengadaan Freezer (Mesin Pembeku Ikan Segar)	20	Unit	4.000.000	80.000.000	Kec. Kumpeh	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	b. Cool box	100	Unit	3.000.000	300.000.000	Kec. Kumpeh, Kec. Jaluko, Kec. Kumpeh Ulu	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana pasca Panen kolam Budidaya				90.000.000			
	a. Pengadaan Jaring Panen	30	Unit	3.000.000	90.000.000	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
5	Pengembangan budidaya ikan di kolam				2.860.000.000			
	- Benih Ikan Patin	100.000	Ekor	600	60.000.000	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Benih Ikan Nila	100.000	Ekor	500	50.000.000	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Benih Ikan Gurame	50.000	Ekor	3.000	150.000.000	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Pakan ikan	200.000	Kg	13.000	2.600.000.000	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Pengembangan Budidaya di KJA				50.000.000			
	- Tali untuk KJA	500	Meter	100.000	50.000.000	Kec. Jaluko, Kec. Sekernan, Kec. Taman Rajo	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
	JUMLAH				5.000.000.000			

9. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAROLANGUN								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengadaan alat tangkap untuk nelayan (perahu dan alat tangkap ramah lingkungan)	10	Paket	5.000.000	50.000.000	10 Kecamatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Bantuan peralatan untuk Pokmaswas (senter, sepatu bot, jas hujan, kartu tanda anggota Pokmaswas dan GPS)	3	Pokmaswas	10.000.000	30.000.000	Lubuk Berdorong, Batang Asai, Berkun	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Bantuan benih untuk Restocking	50.000	Ekor	2.000	100.000.000	Batang Asai dan Lubuk Bedorong	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
4	Pelatihan pengolahan hasil perikanan	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000	Sarolangun	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
5	Bantuan peralatan pengolahan ikan asap (Oven, kompor/tungku, ember, timbangan digital dan vacum sealer)	2	Paket	10.000.000	20.000.000	Singkut dan sarolangun	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
6	Bantuan mesin mixer dan penggoreng abon ikan dll	1	Paket	20.000.000	20.000.000	Sarolangun	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
7	Bantuan ikan konsumsi	2	Paket	20.000.000	40.000.000	Pondok pesantren	T	Kegiatan yang merupakan pendukung pandemi Covid 19, kini tidak lagi dilaksanakan
8	Gemarikan	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000	SDN No. 03 Sarolangun	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
9	Pelatihan budidaya perikanan	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000	Singkut dan sarolangun	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
10	Bantuan indukan dan sapras UPR	3	Paket	20.000.000	60.000.000	Sarolangun, Singkut dan Mandiangin	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
JUMLAH					520.000.000			

10. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Percontohan budidaya Gurame di kolam (benih, pakan dan peralatan)	10	Paket	20.000.000	200.000.000	KOTA JAMBI	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Percontohan budidaya Lele di kolam (benih, pakan dan peralatan)	10	Paket	20.000.000	200.000.000	KOTA JAMBI	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Sarana dan prasarana ikan hias	10	Paket	30.000.000	300.000.000	KOTA JAMBI	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
4	Bantuan peralatan UPR (Blower, Bak Fiber, Tedmon, Genset, Akuarium, dll)	10	Paket	35.000.000	350.000.000	KOTA JAMBI	T	Akan diusulkan melalui DAK
5	Perahu bermesin	30	Unit	7.500.000	225.000.000	KOTA JAMBI		
6	Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Anco)	50	Unit	3.500.000	175.000.000	KOTA JAMBI	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
7	Benih restocking	200.000	Ekor	500	100.000.000	KOTA JAMBI	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
8	Peralatan Pokmaswas	3	Paket	10.000.000	30.000.000	KOTA JAMBI	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
9	Peralatan Pengolahan Hasil perikanan (Kompom gas, pengadon/planetary mixer, chest frezeer)	10	Paket	30.000.000	300.000.000	KOTA JAMBI	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
10	Peralatan pemasaran ikan segar (cool box 200 lt dan timbangan digital)	100	Unit	2.500.000	250.000.000	KOTA JAMBI	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
JUMLAH					2.130.000.000			

11. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH								
NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	LOKASI	Y/T	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengadaan pakan ikan	1,6	Ton	28.800.000	28.800.000	Desa Simpang Tiga Kec. Hamparan Rawang	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Pengadaan calon induk ikan unggul	15	Paket	15.000.000	15.000.000	Desa Talang Lindung Kec. Sungai Bungkal	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
3	Pengadaan calon induk ikan unggul	4	Paket	16.000.000	16.000.000	Desa Seberang Kec. Pesisir Bukit	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
4	Pengadaan calon induk ikan unggul	4	Paket	16.000.000	16.000.000	Desa Aur Duri Kec. Pondok Tinggi	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
5	Pembangunan rumah jaga lubuk larangan di wilayah kampung perikanan				60.000.000	Kampung perikanan	Y	Akan diusulkan pada usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)

6	Pengadaan sapras penangkapan	1	Paket	100.000.000	100.000.000	Desa Tanjung Bunga Kec. Tanah Kampung	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
7	Pengadaan sapras penangkapan	1	Paket	100.000.000	100.000.000	Desa Pinggir Air Kec. Kumun Debai	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
8	Pengadaan sapras penangkapan	1	Paket	100.000.000	100.000.000	Desa Pinggir Air Kec. Kumun Debai	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
9	Pengadaan sapras penangkapan	1	Paket	100.000.000	100.000.000	Desa Pinggir Air Kec. Kumun Debai	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
10	Pengadaan sapras untuk kelompok penangkapan	1	Paket	100.000.000	100.000.000	Desa Tanjung Kec. Hamparan Rawang	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
11	Pembangunan unit pengolahan ikan	1	Unit	200.000.000	200.000.000	Desa Tanjung Kec. Hamparan Rawang	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
12	Pembangunan pasar ikan higienis				300.000.000	Desa Tanjung Bunga Kec. Tanah Kampung	Y	Diajukan ke melalui dana APBN
13	Sarana dan prasarana di pasar ikan				200.000.000	Desa Tanjung Bunga Kec. Tanah Kampung	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
14	Pembangunan balai penyuluh				300.000.000	Penyuluh Perikanan		
15	Pengadaan kendaraan operasional				160.000.000	Penyuluh Perikanan		
JUMLAH					1.795.800.000			

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mengajukan program/kegiatan ke kementerian yang terkait sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini mensejahterakan masyarakat nelayan, pembudidaya serta masyarakat pengolah dan pemasar hasil Kelautan dan Perikanan.

Arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan Daerah dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap berkelanjutan.
3. Meningkatkan produksi perikanan budidaya berkelanjutan.
4. Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

5. Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan Meningkatkan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.
6. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas AKIP dan Pelayanan Publik yang transparan

Tabel 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan DKP Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya Kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Meningkatkan Pengelolaan Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan dengan Rincian Strategi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dan perlindungan kawasan konservasi melalui Penetapan Perda - Pembangunan modeling pengelolaan kawasan konservasi terpadu untuk <i>carbon storage</i> - Penyusunan <i>Ocean Accounting</i> - Pembangunan sistem <i>ocean big data</i> berbasis digital 	Meningkatkan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan
	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Budidaya Optimal	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Budidaya Optimal, dengan Rincian Strategi Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan tata kelola penangkapan ikan terukur - Penguatan infrastruktur dan teknologi perikanan tangkap - Pengembangan pelabuhan sebagai pusat industri perikanan terintegrasi dan pusat aktivitas ekonomi perikanan - Pembangunan perikanan tangkap yang inklusif 	Meningkatkan produksi perikanan tangkap berkelanjutan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan tata kelola perikanan budi daya berkelanjutan - Peningkatan produktivitas budi daya untuk memenuhi kebutuhan pangan akuatik - Peningkatan akses permodalan - Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas perikanan budi daya unggulan untuk mendorong <i>share</i> produk perikanan Daerah pada rantai pasok Daerah - Pembangunan perikanan budi daya yang inklusif - Peningkatan kapasitas dan kompetensi pembudi daya ikan - 	Meningkatkan produksi perikanan budidaya berkelanjutan
	Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya kelautan dan perikanan dan keanekaragaman hayati	Meningkatkan Kelestarian Sumberdaya kelautan dan perikanan dan keanekaragaman hayati Rincian Strategi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan regulasi tata kelola perikanan tangkap - Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan kawasan konservasi - Mengembangkan potensi ekonomi Wilayah Kawasan konservasi - Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 	Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan Daerah	Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan Daerah dengan Rincian Strategi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan Pendidikan terhadap Nelayan, Pembudidaya dan Pelaku 	Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan Meningkatkan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	

		UKM Olahan Ikan - Promosi dan Sosialisasi Gemarikan melalui Media Cetak, Sosial, dan Elektronik - Pemberian Insentif bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Penguatan produk perikanan bermutu, bernilai tambah dan aman konsumsi	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik dengan rincian Strategi sebagai berikut : - Penyelasan Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pemenuhan Pelaporan Kinerja yang berkualitas - Memperkuat evaluasi internal	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas SAKIP dan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel

Adapun keterkaitan Kebijakan RPJMD dengan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dapat dilihat dalam Tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Keterkaitan Kebijakan RPJMD dengan Kebijakan PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan DKP	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, estuaria dan teluk	Meningkatkan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	
		Pemberdayaan masyarakat pesisir		
		Pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RTRW		
		Peningkatan produksi perikanan tangkap	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	
		Meningkatkan pengawasan ter hadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan	
		Peningkatan pengolahan hasil perikanan	Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan Meningkatkan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	
		Menggalakan program Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)		
		Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendukung dua misi, yaitu Misi Pertama, yaitu **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”**, dengan tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis. Indikator tujuan RPJMD dari Misi pertama ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan misi ketiga, yaitu **“Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, dengan tujuan Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Indikator tujuan RPJMD dari misi ketiga ini adalah Indeks Ekonomi Biru.

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah “**Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan**”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Adapun sasaran strategis dari tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 tertuang dalam Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.1. Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

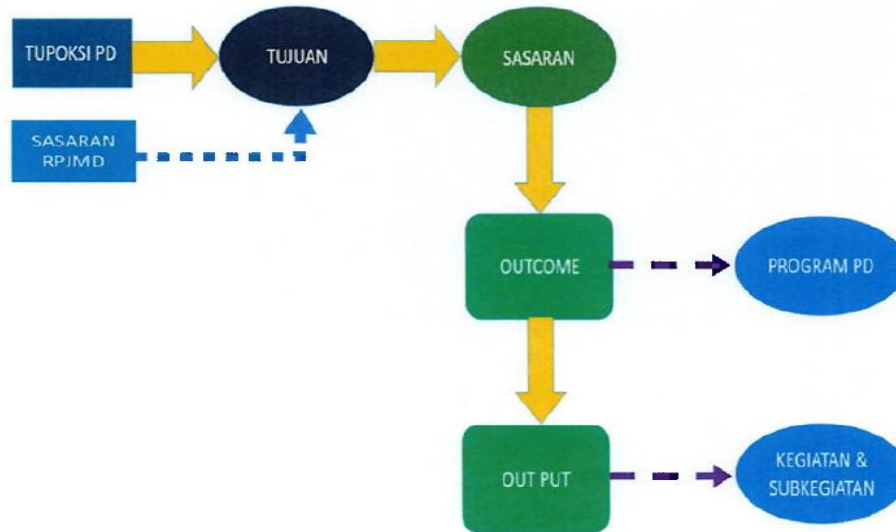
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2024)	2025	Target Kinerja pada Tahun					Kondisi Akhir
							2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)			99,32	100,26	101,85	102,15	102,92	103,45	103,89	103,89
					101,94	102,15	102,38	103,75	103,98	104,25	104,65	104,65
		Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/Trip/Tahun)	188,28	193,61	197,92	201,25	207,50	213,33	218,33	218,33	
			Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Unit Kolam/Tahun)	1,18	1,21	1,21	1,26	1,31	1,37	1,44	1,44	

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan Rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi.

Adapun kerangka perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini :

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan



Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI

- 1) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :**
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- 3) **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah :**
 - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :**

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- Pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapanganP
- engadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

1) Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :

- Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat
- Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 2) **Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :**
 - Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
- 9) **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :**
 - Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- 1) **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil :**
 - Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
 - Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
 - Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap
- 2) **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**
 - Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
 - Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap
- 3) **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT :**
 - Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
- 4) **Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi**
 - Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT.
- 5) **Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi :**
 - Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
 - Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- 1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**
 - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut :**
 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat :**
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/kota
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil :**
 - Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
 - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi
 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- 2) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**
 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan provinsi
 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan di wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan di wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026

- Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar :**
- Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
 - Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
- 3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :**
- Pemetaan dan pemantauan bahan baku utama pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Rencana program dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan indikasi pendanaan tersaji dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif
2	3	4		5	6		7	9
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		86,76	22.225.755.104		87,25	37.000.000.000
		Nilai AKIP Perangkat daerah (Nilai)		78,26 (BB)			80,35 (A)	
		Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)		71			72	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan (%)	Provinsi Jambi	90	319.171.710		90	1.830.000.000
		Tingkat efektivitas dan efisensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan (%)		90			90	
		Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja (%)		95			100	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	3 Dokumen	99.073.100		2 Dokumen	480.000.000
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0		2 Dokumen	350.000.000
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	10 Laporan	62.391.460		10 Laporan	450.000.000
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	1 Laporan	157.707.150		1 Laporan	550.000.000

3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang Difasilitasi	Provinsi Jambi	100	20.854.540.174		100	28.665.500.000
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	151 Orang/Bulan	20.588.461.773,94		152 Orang/Bulan	28.015.500.000
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	1 Dokumen	266.078.400		1 Dokumen	650.000.000
3.25.01.1.03	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi BMD	Provinsi Jambi	100%	84.554.400		100%	515.000.000
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	250.000.000
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	2 Laporan	84.554.400		2 Laporan	265.000.000
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi kepegawaian	Provinsi Jambi	100	85.355.850		100	660.000.000
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Jambi	325 Paket	0		325 Paket	230.000.000
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	20 Orang	6.000.000		20 Orang	150.000.000
3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	200 Orang	79.355.850		200 Orang	280.000.000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Dipenuhi	Provinsi Jambi	100	189.920.551		100	1.191.000.000
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Paket	0		10 Paket	25.000.000
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	20 Paket	21.533.590		20 Paket	300.000.000

3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	0		5 Paket	120.000.000
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	3 Paket	6.827.100		3 Paket	35.000.000
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	34.559.900		5 Paket	65.000.000
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	1.999.961		1 Dokumen	15.000.000
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	12 Laporan	125.000.000		12 Laporan	550.000.000
3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	81.000.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan DKP	Provinsi Jambi	6 Laporan	0		6 Laporan	2.180.000.000
3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Unit	0		5 Unit	450.000.000
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Unit	0		1 Unit	650.000.000
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	0		5 Paket	180.000.000
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Unit	0		10 Unit	150.000.000
3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Unit	0		1 Unit	500.000.000
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	8 Unit	0		10 Unit	250.000.000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Dipenuhi	Provinsi Jambi	90	534.108.119		90	648.500.000

3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	1 Laporan	1.000.000		1 Laporan	8.500.000
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Jambi	12 Laporan	533.108.119		12 Laporan	640.000.000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	Provinsi Jambi	100	158.104.300		100	1.310.000.000
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Jambi	59 Unit	79.133.700		59 Unit	480.000.000
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Jambi	4 Unit	71.280.500		4 Unit	350.000.000
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	3 Unit	0		3 Unit	330.000.000
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	20 Unit	7.690.100		20 Unit	150.000.000
03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Tangkap terhadap PDRB (%)		2,17	851.905.200		2,18	1.600.000.000
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Wilayah Perairan yang Dikelola berdasarkan RZWP3K	Provinsi Jambi	27%	851.905.200		14%	1.220.000.000
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Provinsi Jambi	5715,13 Ha	647.727.200		5.715,13 Ha	565.000.000

3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Provinsi Jambi	627,2 Ha	0	50 Ha	85.000.000
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	60 Orang	204.178.000	60 Orang	280.000.000
3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0
3.25.02.1.01.0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	100.000.000
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Provinsi Jambi	25 Pelaku Usaha	0	25 Pelaku Usaha	60.000.000
3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	1 Dokumen	65.000.000
3.25.02.1.01.0011	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Provinsi Jambi	5 Kelompok masyarakat	0	5 Kelompok masyarakat	65.000.000

3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Terbitnya Dokumen perizinan yang sesuai dengan RZWP3K	Provinsi Jambi	2 Izin	0	2 Izin	120.000.000
3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	2 Rekomendasi	0	2 Rekomendasi	60.000.000
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0	2 Dokumen	60.000.000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir	Provinsi Jambi	30 Kelompok	0	30 Kelompok	260.000.000
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi Jambi	60 Orang	0	60 Orang	65.000.000
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	8 Kelompok	0	8 Kelompok	75.000.000
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	20 Orang	0	5 Kelompok	120.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		47.500	1.820.804.909	48.300	15.200.000.000
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap di laut	Provinsi Jambi	41.247 Ton	1.133.275.500	42.800 Ton	8.800.000.000
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50.000.000

3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2500 Unit	1.133.275.500		150 Unit	6.500.000.000
3.25.03.1.01.0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Provinsi Jambi	0 Unit	0		10 Unit	1.450.000.000
3.25.03.1.01.0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		0 Unit	0		10 Unit	500.000.000
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		0 Unit	0		10 Unit	300.000.000
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD)	Provinsi Jambi	5,300 Ton	444.129.300		5,500 Ton	3.140.000.000
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	50.000.000
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	355 Unit	444.129.300		65 Unit	3.090.000.000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang Terbit	Provinsi Jambi	1 SIPI/SIKPI	0		1 SIPI/SIKPI	450.000.000
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Provinsi Jambi	65%	0		65%	200.000.000

3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	250.000.000
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0		2 Dokumen	60.000.000
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	30.000.000
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	30.000.000
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	Provinsi Jambi	4.350 Kapal	243.400.109		4.370 Kapal	2.750.000.000
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Provinsi Jambi	1 Unit	0		2 Unit	2.300.000.000
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Provinsi Jambi	2 Layanan	243.400.109		2 Layanan	450.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		51.082	1.467.155.100		53.125	10.550.000.000
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pembudidayaan ikan yang Terbit	Provinsi Jambi	1 izin usaha	0		1 izin usaha	450.000.000

3.25.04.1.01.0002	<i>Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	0		1 Rekomendasi	200.000.000
3.25.04.1.01.0003	<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	250.000.000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	135.112.400		2 Kegiatan	2.100.000.000
3.25.04.1.05.0004	<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Jambi	5 Unit	0		5 Unit	550.000.000
3.25.04.1.05.0007	<i>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>	Jumlah Pembudidaya	Provinsi Jambi	60 orang	0		60 orang	150.000.000
3.25.04.1.05.0011	<i>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Provinsi Jambi	10 unit	135.112.400		10 unit	750.000.000
3.25.04.1.05.0012	<i>Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		2 Dokumen	650.000.000
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	1.332.042.700		2 Kegiatan	8.000.000.000
3.25.04.1.06.0003	<i>Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	15 Unit	273.382.450			3.450.000.000
3.25.04.1.06.0004	<i>- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Provinsi Jambi	100 Unit	1.058.660.250		15 Unit	3.000.000.000

03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)		10.772,33	296.465.300		5.715,13	5.000.000.000
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	Provinsi Jambi	60%	288.965.300		62%	4.035.000.000
3.25.05.1.01.0011	<i>Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan</i>	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Provinsi Jambi	1 Unit	0		1 Unit	385.000.000
3.25.05.1.01.0014	<i>Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi</i>	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan sampai kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi dengan 12 mil yang diperiksa	Provinsi Jambi	2 Pelaku Usaha	288.965.300		3 elaku usaha	750.000.000
3.25.05.1.01.0015	<i>Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</i>	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Provinsi Jambi	2 Unit	0		2 Unit	2.300.000.000
3.25.05.1.01.0016	<i>Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi</i>	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		2 pelaku usaha	0		3 pelaku usaha	300.000.000
3.25.05.1.01.0017	<i>Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</i>	Jumlah POKMASWAS yang ditubuhkan, dan dikembangkan		2 Kelompok Masyarakat	0		2 Kelompok Masyarakat	300.000.000
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	Provinsi Jambi	84%	7.500.000		85%	965.000.000
3.25.05.1.02.0004	<i>Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Jambi	2 pelaku usaha	0		4 pelaku usaha	250.000.000

3.25.05.1.02.0005	<i>Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi</i>	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Jambi	2 pelaku usaha	7.500.000		3 pelaku usaha	450.000.000
3.25.05.1.02.0006	<i>Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi</i>	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Jambi	2 plaku uasaha	0		3 pelaku usaha	265.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn)		28,67	672.561.220		29,27	7.000.000.000
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Provinsi Jambi	2 Izin	324.845.400		2 Izin	1.450.000.000
3.25.06.1.01.0004	<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Provinsi Jambi	3 Dokumen	324.845.400		3 Dokumen	1.250.000.000
3.25.06.1.01.0007	<i>Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar</i>	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Provinsi Jambi	3 Rekomendasi	0		3 Rekomendasi	200.000.000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Provinsi Jambi	10 Kelompok	197.537.440		10 Kelompok	2.100.000.000
3.25.06.1.02.0003	<i>Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</i>	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Jambi	3 Kegiatan	110.814.800		4 Kegiatan	850.000.000

3.25.06.1.02.0004	<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	86.722.640		3 Kegiatan	1.250.000.000
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi pengolahan hasil perikanan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	150.178.380		1 Dokumen	3.450.000.000
3.25.06.1.03.0001	<i>Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	300.000.000
3.25.06.1.03.0002	<i>Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Provinsi Jambi	10 Unit Usaha	150.178.380		10 Unit Usaha	2.750.000.000
3.25.06.1.03.0005	<i>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Provinsi Jambi	1 Sistem Informasi	0		1 Sistem Informasi	400.000.000
JUMLAH TOTAL					27.334.646.833			78.868.000.000

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
2	3	4		5	6
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		86,76	22.225.755.104
		Nilai AKIP Perangkat daerah (Nilai)		78,26 (BB)	
		Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)		71	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan (%)	Provinsi Jambi	90	319.171.710
		Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan (%)		90	
		Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja (%)		95	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	3 Dokumen	99.073.100
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	10 Laporan	62.391.460
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	1 Laporan	157.707.150
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang Difasilitasi	Provinsi Jambi	100	20.854.540.174
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	151 Orang/Bulan	20.588.461.773,94
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	1 Dokumen	266.078.400
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi BMD	Provinsi Jambi	100%	84.554.400
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	2 Laporan	84.554.400
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	Provinsi Jambi	100	85.355.850
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Jambi	325 Paket	0
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	20 Orang	6.000.000

3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	200 Orang	79.355.850
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Dipenuhi	Provinsi Jambi	100	189.920.551
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Paket	0
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	20 Paket	21.533.590
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	0
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	3 Paket	6.827.100
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	34.559.900
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	1.999.961
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	12 Laporan	125.000.000
3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan DKP	Provinsi Jambi	6 Laporan	0
3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Unit	0
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Unit	0
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	0
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Unit	0
3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Unit	0
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	8 Unit	0
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Dipenuhi	Provinsi Jambi	90	534.108.119
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	1 Laporan	1.000.000
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Jambi	12 Laporan	533.108.119
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	Provinsi Jambi	100	158.104.300

3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Jambi	59 Unit	79.133.700
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Jambi	4 Unit	71.280.500
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	3 Unit	0
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	20 Unit	7.690.100
03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Tangkap terhadap PDRB (%)		2,17	851.905.200
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Wilayah Perairan yang Dikelola berdasarkan RZWP3K	Provinsi Jambi	27%	851.905.200
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Provinsi Jambi	5715,13 Ha	647.727.200
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Provinsi Jambi	627,2 Ha	0
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	60 Orang	204.178.000
3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.02.1.01.0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	1 Kegiatan	0
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Provinsi Jambi	25 Pelaku Usaha	0
3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0

3.25.02.1.01.0011	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Provinsi Jambi	5 Kelompok masyarakat	0
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Terbitnya Dokumen perizinan yang sesuai dengan RZWP3K	Provinsi Jambi	2 Izin	0
3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	2 Rekomendasi	0
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir	Provinsi Jambi	30 Kelompok	0
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi Jambi	60 Orang	0
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	8 Kelompok	0
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	20 Orang	0
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		47.500	1.820.804.909
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap di laut	Provinsi Jambi	41.247 Ton	1.133.275.500
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2500 Unit	1.133.275.500
3.25.03.1.01.0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Provinsi Jambi	0 Unit	0
3.25.03.1.01.0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		0 Unit	0
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		0 Unit	0

3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD)	Provinsi Jambi	5,300 Ton	444.129.300
3.25.03.1.02.0001	<i>Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</i>	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.03.1.02.0004	<i>Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</i>	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	355 Unit	444.129.300
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang Terbit	Provinsi Jambi	1 SIPI/SIKPI	0
3.25.03.1.03.0004	<i>Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil</i>	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Provinsi Jambi	65%	0
3.25.03.1.03.0005	<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil</i>	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Jambi	2 Dokumen	0
3.25.03.1.05.0003	<i>Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT</i>	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.03.1.05.0004	<i>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT</i>	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	Provinsi Jambi	4.350 Kapal	243.400.109
3.25.03.1.06.0002	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Provinsi Jambi	1 Unit	0
3.25.03.1.06.0003	<i>Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan</i>	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Provinsi Jambi	2 Layanan	243.400.109
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		51.082	1.467.155.100
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pembudidayaan ikan yang Terbit	Provinsi Jambi	1 izin usaha	0
3.25.04.1.01.0002	<i>Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan</i>	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Provinsi Jambi	1 Rekomendasi	0

3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	135.112.400
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Jambi	5 Unit	0
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Provinsi Jambi	60 orang	0
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Provinsi Jambi	10 unit	135.112.400
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	1.332.042.700
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	15 Unit	273.382.450
3.25.04.1.06.0004	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dia air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Provinsi Jambi	100 Unit	1.058.660.250
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)		10.772,33	296.465.300
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	Provinsi Jambi	60%	288.965.300
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Provinsi Jambi	1 Unit	0
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkutan ikan sampai kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi dengan 12 mil yang diperiksa	Provinsi Jambi	2 Pelaku Usaha	288.965.300
3.25.05.1.01.0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Provinsi Jambi	2 Unit	0
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		2 pelaku usaha	0

3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditubuhkan, dan dikembangkan		2 Kelompok Masyarakat	0
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	Provinsi Jambi	84%	7.500.000
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Jambi	2 pelaku usaha	0
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Jambi	2 pelaku usaha	7.500.000
3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Provinsi Jambi	2 plaku usaha	0
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn)		28,67	672.561.220
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Provinsi Jambi	2 Izin	324.845.400
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Provinsi Jambi	3 Dokumen	324.845.400
3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Provinsi Jambi	3 Rekomendasi	0
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Provinsi Jambi	10 Kelompok	197.537.440
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Jambi	3 Kegiatan	110.814.800

3.25.06.1.02.0004	<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Provinsi Jambi	2 Kegiatan	86.722.640
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi pengolahan hasil perikanan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	150.178.380
3.25.06.1.03.0001	<i>Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	1 Dokumen	0
3.25.06.1.03.0002	<i>Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Provinsi Jambi	10 Unit Usaha	150.178.380
3.25.06.1.03.0005	<i>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Provinsi Jambi	1 Sistem Informasi	0
JUMLAH TOTAL					27.334.646.833

BAB 5

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2026. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026 wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran ini merupakan hasil kerja dari semua jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang didukung oleh seluruh masyarakat khususnya yang bergerak di sektor Kelautan dan Perikanan akan tetapi dilihat dari capaian yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jambi masih belum tercapai, walau demikian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi akan terus memacu agar yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Jambi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD, DAK, dan APBN Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi

daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Sangat disadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja sangat diharapkan sehingga Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

“Perencanaan yang baik bukan berarti segala-galanya, Tetapi
Tanpa perencanaan yang baik, segala-galanya menjadi tidak berarti”

Jambi, September 2025

KEPALA DINAS



ASRAF, S.Pt. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661120 199403 1 006